

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara, Thailand merupakan negara anggota yang juga menjadi bagian dari ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Selain itu Thailand merupakan negara terbesar ketiga di Asia Tenggara yang memiliki luas wilayah sebesar 514.000 km², berupa luas daratan sebesar 511.770 km² dan luas perairan sebesar 2.230 km² (Bappenas, n.d). Meskipun luas perairan Thailand lebih sedikit dari wilayah daratannya, namun Thailand juga dikelilingi oleh wilayah perairan di antaranya seperti Sungai Mekong, Sungai Chao Praya, Teluk Thailand, dan beberapa pantai setempat. Permukaan wilayah Thailand terbagi menjadi empat wilayah, yakni Tengah, Selatan, Timur, Utara dan Barat. Pada wilayah Tengah dan Selatan Thailand, terdapat area perairan yang berupa dataran rendah yang dialiri Sungai Chao Praya dan semenanjung Thailand di wilayah Selatan terdapat di Laut Andaman dan Teluk Siam (Marisha, 2020).

Aktivitas masyarakat yang semakin padat, urbanisasi penduduk, penambahan populasi manusia, dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan limbah sampah yang lambat laun mulai menumpuk. Gaya hidup, kebiasaan, dan masyarakat urban yang semakin makmur di Asia Tenggara menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah sampah. Kenaikan produksi dan konsumsi plastik akibat pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga menjadi salah satu penyebabnya, di mana sekitar 2,9% plastik diproduksi di Thailand setiap tahunnya dan terus bertambah (SEA Circular, n.d). Pada faktanya, sampah plastik kemasalah yang seringkali ditemui di pantai-pantai Thailand, hal yang

terlihat sepele namun siapa sangka bahwa sampah di daratan akan bisa hanyut menjadi sampah lautan.

Masalah sampah laut di kawasan Asia Tenggara telah muncul sejak lama, namun belum adanya solusi ataupun tindakan serius terkait masalah ini. Oleh karena hal itu, akhirnya sampah plastik akan berakhir di lautan atau wilayah perairan dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak dan kurangnya fasilitas untuk mengelola sampah. Menurut data dari The World Bank (2020), selama tahun 2012-2015 jumlah limbah sampah plastik di Thailand meningkat dari 12% menjadi 13% yang keberadaan limbah tersebut tentu akan menjadi ancaman bagi negara Thailand yang kemungkinan akan tenggelam oleh limbah plastik (Mekong River Commission, 2022). Sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, Thailand memiliki tanggungjawab besar karena kawasan regionalnya dikelilingi sejumlah sungai besar dan beberapa destinasi wisatanya merupakan pantai-pantai indah.

Dikutip dari Simachaya (2017), menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, rata-rata dari pertahun sampah plastik yang hanyut ke lautan yakni dapat mencapai 51.000 ton setiap tahunnya. Sampah-sampah plastik yang tidak dikumpulkan dan dibuang sembarangan itu mencemari wilayah pesisir dan laut, memberikan dampak buruk bagi keanekaragaman hayati, lingkungan pantai, zona karang, dan ekosistem bakau (SEA Circular, n.d). Dalam level domestiknya, Thailand menyumbang sampah sebanyak 2.33 ton dan 47.6% di antaranya merupakan tas belanja plastik (Maharani, 2023). Banyaknya sampah di lautan juga akibat dari adanya impor sampah dari luar negeri. Namun, Thailand mulai melarang impor sampah plastik luar negeri pada tahun 2021. Hal ini karena Thailand juga sempat menjadi negara tujuan para eksportir sampah di masa lampau. Dikutip dari data oleh Trademap, Thailand pernah menerima impor sampah yang datanya sebagai berikut: tahun 2016 (69,487 ton), tahun 2017 (152,244 ton), dan tahun 2018 sebanyak 481,381 ton (Greenpeace, 2019). Selain itu

Thailand juga pernah menerima impor sampah dari negara besar seperti Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017 sebanyak 4.000 ton pada 6 bulan pertama di tahun 2017. Negara Thailand menjadi salah satu destinasi negara ekspor sampah oleh negara-negara maju di mana hal ini menjadi satu masalah baru bagi Thailand dalam menyelesaikan isu sampah laut, sehingga pelarangan impor sampah luar negeri diberlakukan oleh negara Thailand.

Thailand menjadi salah satu negara tujuan utama perdagangan sampah plastik setelah Cina mengumumkan larangan impor sampah dalam waktu enam bulan setelah larangan tersebut, namun pada pertengahan tahun 2018 Thailand mengeluarkan peraturan terkait ekspor limbah plastik di seluruh dunia (terutama dari AS, Jerman, Inggris, dan Jepang), mengalihkan semua ekspor limbah ke Indonesia dan Turki, dua importir utama dunia saat ini.

Dampak dari sampah laut yang amat krusial ini salah satunya akan memberikan efek buruk bagi laut dan para makhluk yang hidup di dalamnya. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Thailand akibat sampah laut yaitu pada tahun 2018 di bulan Juni, ditemukan ikan paus pilot yang terdampar dan di dalam tubuhnya terdapat lebih dari 80 kantong plastik seberat 8 kg (Salsabila *et al.*, 2022). Hal ini hanya menjadi salah satu dari bukti nyata yang menunjukkan bahwa begitu parah dan mengkhawatirkannya isu sampah laut ini, karena ancaman polusi laut yang dapat membuat biota dan ekosistem laut rusak serta terganggu di Thailand. Banyak aspek lingkungan lainnya yang keberadaannya terancam akan sampah plastik di lautan, seperti ekosistem laut yang terganggu, rusaknya terumbu karang, hasil tangkapan laut yang berkurang, ekosistem bakau yang rusak, tercemarnya kawasan pantai sebagai destinasi wisata, dan lain sebagainya. Terlebih lagi ditemukan sekitar 51.000 ton sampah plastik yang tidak dikumpulkan dan dibuang sembarangan, hanyut ke laut di Thailand setiap tahunnya (SEA Circular, n.d). Setiap tahunnya, total

rata-rata sampah plastik yang dibuang ke lingkungan laut bisa mencapai 9,3 ton, yang berarti setara dengan 0,4 kg/kapita/tahun sampah plastik di lautan. Jumlah sampah plastik laut di Thailand dapat bertambah terutama pada musim hujan menjadi 14,3 ton/tahun sedangkan pada musim panas kemungkinan menjadi 4,9 ton/tahun (The World Bank, 2022). Selain itu, sisa limbah plastik yang tidak dikumpulkan dengan baik akan dibuang langsung ke saluran air. Sampah plastik yang salah kelola akan dicuci ke wilayah sungai dan laut, sehingga limbah yang awalnya berasal dari darat akan mengarah ke perairan juga nantinya. Diperkirakan sekitar 8 juta ton (2,9 %) sampah plastik yang berasal dari aliran sungai masuk ke wilayah lautan (Mekong River Commission, 2022).

Padahal, salah satu mata pencaharian masyarakat di Thailand adalah menjadi nelayan, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan dan Laut Andaman yang menjadi wilayah penting bagi sumber perikanan penduduk setempat (Soh, 2017). Tentunya hal ini amat berbahaya apabila para nelayan tidak mendapatkan tangkapan yang ikan yang sehat dan apabila jumlah ikan yang lambat laun mulai berkurang akibat memakan sampah di laut. Otomatis hal ini juga dapat berpengaruh pada pendapatan ekonomi warga setempat dikarenakan aktivitas produksi perikanan yang terganggu.

Dunia internasional juga telah melihat bahwa isu sampah laut yang hadir di regional ASEAN sangatlah memprihatinkan, karena belum adanya tingkat penurunan atau tindakan serius yang dilakukan pemerintah. Hal ini ditunjukkan melalui penelitian dari Jenna R. Jambeck dkk, yang menyebutkan bahwa enam negara anggota ASEAN termasuk ke dalam daftar 20 negara tertinggi yang pengelolaan sampahnya buruk sehingga berakibat pada pencemaran laut (Jambeck *et al.*, 2015). Thailand menjadi negara keenam yang menyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia, di mana kebocoran sampah plastik masuk ke dalam air, air limbah, serta sistem drainase di seantero negeri

Thailand yang juga terkontaminasi sampah plastik (SEA Circular, n.d).

Guna mengatasi hal tersebut, Thailand bersama dengan ASEAN mengadakan KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, pada 22 Juni 2019 yang bertujuan untuk menemukan solusi dalam penanganan masalah sampah plastik yang berakhir di lautan (Maharani, 2023). Dari pertemuan tersebut kemudian diadopsi *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* yang rencananya akan direalisasikan oleh setiap negara anggota ASEAN. Pada dasarnya, *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* lebih mengarah kepada pendekatan *land-to-sea* di mana terdapat strategi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang berguna untuk meminimalisir dan mengatur penggunaan bahan baku serta pembuangan limbah (Fadilah et al., 2022).

Namun diperlukan bentuk kerja nyata untuk mewujudkan target dari deklarasi tersebut, sehingga ASEAN juga meluncurkan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)*, yang membahas tentang strategi bersama dalam penyelesaian masalah sampah laut dan bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan plastik di lautan wilayah regional ASEAN. Rencana aksi regional tersebut dilaksanakan sejak tahun 2021 dan ditargetkan hingga tahun 2025. Selain itu, rencana aksi regional ini juga menjadi catatan bagi KTT ke-34 tersebut karena telah menjadi rekomendasi dari digelarnya *ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region* pada 22-23 November 2017 di Phuket, Thailand. Oleh karenanya, *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* tersebut menjadi landasan yang dipegang Thailand untuk memerangi polusi laut akibat sampah.

Dilansir dari The World Bank (2021), Menteri Sumber Daya Nasional dan Lingkungan Thailand, H.E. Varawut Silpa-archa, mengatakan bahwa *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* (Rencana Aksi Regional untuk Memerangi Sampah Laut) ini akan berperan penting untuk mencapai visi ASEAN mengenai

penyelesaian isu sampah laut demi melindungi lingkungan laut (The World Bank, 2021). Serta diperlukannya dukungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan multisektor demi mewujudkan rencana aksi regional tersebut, termasuk juga Thailand sebagai negara yang ikut mengimplementasikan *Regional Action Plan*.

Ditargetkan mulai sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 ke depan, rencana aksi regional tersebut banyak menggarisbawahi kolaborasi dan kerjasama terkait pengelolaan sampah plastik terutama yang berada di lautan. *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* ini telah mencakup 14 aksi di empat pilar seperti *Policy Support and Planning; Research, Innovation and Capacity Building; Public Awareness, Education and Outreach; and Private Sector Engagement* (The World Bank, 2021).

Namun terdapat beberapa tantangan dan rintangan dalam pengimplementasian *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* di Thailand, baik tantangan dari pemerintah, masyarakat, maupun dari pihak lain yang terkait. Sampah yang berasal dari kawasan pesisir dan atau yang berasal dari daratan, dapat mencemari lautan akibat terbawa angin atau terbawa arus air laut secara perlahan-lahan. Padahal sampah akan dengan cepat hanyut ke lautan dan hal itu akan berpengaruh buruk terhadap ekosistem laut. Hal tersebut benar adanya, karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi pemutihan karang akibat polusi air, sampah sembarangan, serta konstruksi di laut Thailand (Ocharoenchai, 2019). Sampah dapat berakhir di lautan akibat pengelolaan limbah yang salah, di mana limbah sampah akan berakhir di sungai kemudian akan dibuang ke laut, yang mana situasi tersebut sebetulnya sangatlah mengkhawatirkan karena laut dan lingkungan sekitarnya menjadi amat mudah tercemar oleh sampah yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya untuk mencapai *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* di

Thailand, masih terdapat berbagai macam tantangan dan hambatan yang dapat menghambat praktik implementasi aksi regional tersebut, yang penjelasannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam pembahasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis telah merumuskan masalah berupa pertanyaan: “Mengapa Thailand belum optimal dalam mewujudkan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat hal-hal apa saja yang menjadi tantangan maupun hambatan bagi Thailand dalam mengimplementasikan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* untuk mengatasi permasalahan sampah laut di kawasan regional ASEAN khususnya di negara Thailand.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah untuk menjadi tambahan ilmu bagi akademisi yang tertarik di bidang lingkungan ataupun kebijakan politik nasional negara Thailand, selain itu juga menjadi wawasan baru atau referensi bagi penstudi HI yang mungkin dapat mempertimbangkan topik seperti penelitian ini. Pembaca juga dapat menemukan fakta-fakta mengenai bagaimana penanganan negara Thailand dalam mengatasi masalah sampah laut yang selama ini telah hadir di lingkup regional ASEAN.

1.5 Sistematika Bab

Dalam memudahkan para pembaca untuk memahami penelitian ini, penulis akan membagi sistematika penelitian menjadi empat bab,

rinciannya sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang berupa latar belakang masalah tentang *background* negara Thailand, permasalahan sampah laut di Thailand, penyebab munculnya sampah laut, awal mula dari diadopsinya *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* untuk mengurangi sampah laut, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir sistematika bab.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, yang berupa landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang berupa jenis dan desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan, yang berupa: Pertama, definisi dari *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)*. Kedua, masalah sampah laut di Thailand. Ketiga, tantangan dan hambatan Thailand dalam mencapai *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* berdasarkan *Teori Institutional Analysis and Development Framework*.

Bab V berisi tentang penutup, yang berupa kesimpulan dari penelitian ini.